

## **BAB II**

### **TINJUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Sebelumnya**

Agustina & Pratomo (2019) menjelaskan bahwa jumlah komite audit independen (komite audit dari luar) memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan, Anggota komite independen adalah seseorang yang tidak memiliki hubungan saat ini atau sebelumnya dengan perusahaan. Sehingga sangat independen dalam bekerja sebagai pengawas dan membantu mengurangi konflik agensi antara pemegang saham dan pengelola entitas. Oleh karena itu komite audit mampu mengoptimalkan dalam monitoring dan memberikan kritik terkait kebijakan manajemen sehingga komite audit independen mampu mengurangi kemungkinan laporan keuangan yang dimanipulasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Kamarudin & Ismail (2014) mendapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh komite audit terhadap kecurangan laporan keuangan. Dijelaskan bahwa semakin tinggi peran komite audit dalam melakukan pengawasan sebagai fungsi monitoring maka tindak kecurangan laporan keuangan akan semakin rendah. Hadirnya komite audit diharapkan mampu untuk mengurangi tindakan yang tidak semestinya oleh manajer.

Pratiya et al., (2018) melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan laporan keuangan. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa target keuangan, tingkat kinerja, keahlian keuangan komite audit, dan profitabilitas berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Dijelaskan bahwa sebaiknya perusahaan menentukan komite audit berdasarkan atas keahlian di bidang keuangan agar pengawasan terhadap perusahaan juga lebih maksimal.

Widodo & Syafruddin (2017) melakukan penelitian menguji kecurangan laporan keuangan. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa anggota dewan komisaris dengan pengalaman internasional dan efektivitas internal audit berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa keefektifan internal audit akan memberikan keuntungan pada perusahaan karena memiliki pengetahuan tentang perusahaan tersebut, sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi “*red flags*” setiap ada potensi terjadinya kecurangan laporan keuangan.

Kartika & Sudarno (2014) melakukan penelitian deteksi kecurangan laporan keuangan. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa pengalaman pra komite audit berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan laporan keuangan. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pengalaman kerja yang cukup panjang bagi seorang komite audit diharapkan mampu menjalankan fungsinya sebagai pengawasan di dalam perusahaan.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Teori Keagenan**

Didalam teori keagenan Jensen & Meckling (1976) menjelaskan “suatu kontrak kerjasama antara *principal* dan *agent* yang mengelola penggunaan dan pengendalian sumber daya berangkat dari berbagai pihak dalam entitas dan perbedaan kepentingan”. Dari teori keagenan diatas penelitian ini menjadi penentu karakteristik komite audit terhadap kecurangan laporan keuangan. Jensen & Meckling (1976) dalam teorinya berasumsi setiap individu bertindak berdasarkan kepentingan masing-masing.

Prinsipal sebagai pemilik entitas berkepentingan terhadap investasinya dalam entitas. Kepentingan prinsipal adalah harapan atas tumbuhnya investasi secara kontinyu. Untuk dapat mengakomodasi kepentingannya, di butuhkan agen sebagai pengelola entitas. Agen menerima balas jasa berupa kompensasi dengan syarat-syarat tertentu terkait hubungan tersebut. Hubungan antara prinsipal dan agen dapat diekstensikan melalui angka akuntansi (Scott, 2015:335). Untuk dapat mencapai kepentingannya, agen selaku pengelola entitas cenderung untuk menerapkan praktik-praktik tertentu terhadap angka akuntansi tersebut. Sebagai contoh, praktik yang sering dilakukan adalah manipulasi laporan keuangan. Sebagai pihak pengelola entitas, secara otomatis agen memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan prinsipal. Adanya akses lebih terhadap informasi entitas tersebut dapat memicu agen untuk bertindak hanya untuk kepentingannya sendiri. Inilah kondisi yang sulit untuk dikendalikan oleh prinsipal selaku pemilik yang hanya mempunyai sedikit informasi mengenai entitas. Kondisi kesenjangan informasi antara prinsipal dan agen disebut asimetri informasi.

Asimetri informasi dapat berupa dua bentuk yakni *adverse selection* dan *moral hazard*. *Adverse selection* merupakan bentuk asimetri informasi dimana adanya keuntungan bagi agen akibat kondisi tersebut. Sementara *moral hazard* dapat didefinisikan sebagai bentuk asimetri informasi di mana agen dapat melakukan tindakan-tindakan yang tidak terkira untuk kepentingan tertentu. Dalam hal ini, sifat manusia yang *self-interest* (bertindak atas kepentingan pribadi) cenderung melakukan tindakan-tindakan yang mungkin hanya menguntungkan dirinya sendiri (*utility maximizers*). Ketika sifat *self-interest*

dibenturkan dengan hubungan prinsipal dan agen, maka terdapat kondisi di mana adanya perbedaan kepentingan antara keduanya.

Dengan adanya hubungan antara prinsipal dan agen pada entitas, maka hubungan tersebut syarat dengan konflik kepentingan. Kecenderungan untuk memaksimalkan kepentingan pribadi dapat memicu adanya tindakan yang tidak semestinya. Tindakan tersebut dapat diekstensikan dengan bentuk yang ekstrim seperti manipulasi laporan keuangan, menghilangkan item-item tertentu dalam laporan keuangan, dan sebagainya.

Untuk meminimiliasi terjadinya hal tersebut, perlu adanya suatu upaya untuk mengatasi serta mengurangi masalah keagenan, hal ini menimbulkan adanya biaya keagenan (*agency cost*). *Agency cost* adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan untuk mengawasi tindakan manajer agar manajer bertindak sebagaimana yang diharapkan. Biaya keagenan ini nantinya akan ditanggung oleh prinsipal dan agen. Terdapat tiga jenis biaya keagenan yang diungkapkan oleh Jensen & Meckling (1976) yaitu *monitoring solution*, *bonding solution* dan *incentive solution*.

Sifat dari hubungan keagenan yang melekat konflik keagenan didalamnya berimplikasi pada mekanisme pengawasan. Dalam teori keagenan mekanisme pengawasan berimplikasi pada *monitoring solution* dimana yang dapat dilakukan adalah melalui pengawasan yang dilakukan oleh audit. Dalam bentuk mekanisme pengawasan, audit bertugas untuk mengawasi tindakan manajemen yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Mekanisme tersebut menimbulkan biaya yang disebut *agency cost*. Secara spesifik pengawasan dilakukan untuk meminimalisasi perilaku oportunistis manajer.

### 2.2.2 Kecurangan Laporan Keuangan

Secara definitif kecurangan laporan keuangan adalah suatu bentuk penyajian yang keliru atau adanya salah saji yang disengaja pada laporan keuangan entitas, di mana misrepresentasi tersebut dilakukan dengan cara menyalahsajikan atau dengan cara menghilangkan jumlah angka tertentu dari item laporan keuangan dengan tujuan mengelabui / menipu pengguna laporan keuangan.

Kecurangan dalam pelaporan keuangan biasanya ditujukan untuk tujuan yang bersifat umum, daripada tujuan individual. Seseorang yang mengejar keuntungan dari kejahatan mungkin akan melakukan kecurangan pelaporan keuangan. Motifnya bisa berupa menjaga kontrak utang untuk keuntungan pribadinya, atau meningkatkan harga saham, atau mungkin untuk memperoleh bonus tertentu. Dalam perspektif teori keagenan hubungan antara *principal* dan *agent* memunculkan konflik dimana konflik itu disebut asimetri informasi. Kesenjangan informasi tersebut menyebabkan agen dapat melakukan tindakan untuk kepentingan tertentu. Tindakan tersebut cenderung hanya untuk mementingkan dirinya sendiri. Dan salah satu tindakan yang dilakukan agen adalah manajemen laba hingga yang lebih ekstrim yaitu dengan melakukan kecurangan laporan keuangan.

Kecurangan pelaporan keuangan selalu melibatkan melebihsajikan aset, pendapatan, dan laba, serta mengurangisajikan utang, beban, dan kerugian. Terkadang, hasil yang berlawanan menjadi tujuan. Misalnya, memperkecil aset dan pendapatan untuk menghasilkan beban pajak yang lebih kecil. Atau mungkin *fraudster* menutupi *over-budget* pada tahun-tahun yang sehat, untuk membantu kekurangan pada tahun berikutnya (Wells et al., 2017).

### **2.2.3 Ukuran Komite Audit**

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh perusahaan untuk melakukan proses pengawasan mengenai penyusunan laporan keuangan perusahaan, yang bertujuan untuk menekan sebuah tindakan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Sehingga laporan keuangan perusahaan yang disajikan dapat dipercaya akan hasil informasinya. Terciptanya fungsi pengawasan komite audit yang efektif berhubungan dengan jumlah sumber daya yang dimiliki komite tersebut. Semakin besar ukuran komite audit maka perusahaan akan memiliki sumber daya yang cukup untuk memonitor sebuah perusahaan tersebut (Novira, Basri, & Kurnia, 2018). Ukuran komite audit diharapkan dapat meningkatkan mekanisme *check and balance* (pengawasan dan keselarasan) dalam sebuah perusahaan sehingga dapat meminimalisir terjadinya praktik manipulasi laporan keuangan.

### **2.2.4 Komite Audit Independen**

Salah satu dari karakteristik komite audit yang dapat meningkatkan fungsi pengawasan adalah independen. Anggota komite audit yang independen akan memastikan pelaporan keuangan yang lebih berkualitas. Semakin independen anggota tersebut, maka kualitas pelaporan keuangan oleh perusahaan lebih dapat dipercaya. Sehingga independen yang dimiliki oleh komite audit dapat meminimalisasi adanya kecurangan laporan keuangan.

Persyaratan independen yaitu bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non audit atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat

oleh Komisaris. Seorang anggota Komite Audit haruslah tidak di kendalikan ataupun terpengaruh oleh pihak lainnya yang berkepentingan. Dan tidak merangkap pekerjaan dalam satu perusahaan.

Alasan utama independensi ini adalah untuk memelihara integritas serta pandangan yang objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh komite audit, karena individu yang independen cenderung lebih adil dan tidak memihak serta obyektif dalam menangani suatu permasalahan (Prasetyo, 2014).

#### **2.2.5 Financial Expertise**

Selain independen, untuk menjadi komite audit harus memiliki kemampuan di bidang keuangan. Anggota komite audit wajib mengerti tentang laporan keuangan, khususnya di perusahaan. Dalam penelitian Handoko & Ramadhani (2017) mengatakan bahwa semua anggota komite audit harus bisa memahami tentang laporan keuangan, minimal 1 orang yang bisa menguasainya. Apabila komite audit paham akan laporan keuangan maka lebih mudah untuk melakukan atau mencari solusi yang tepat. Sesuai fungsi dan tujuan dibentuknya komite audit, proses pengawasan laporan keuangan, pemilihan auditor serta biaya audit yang dikeluarkan akan bergantung kepada keahlian keuangan komite audit yang dimiliki perusahaan.

## 2.3 Hipotesis

### 2.3.1 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Salah satu karakteristik komite audit yang mendukung fungsi pengawasan terhadap manajemen (*agent*) agar tidak merugikan pemilik perusahaan (*principal*) adalah ukuran komite audit. Dalam teori keagenan konflik hubungan tersebut dapat diminimalisasi melalui mekanisme *monitoring solution*. Beberapa mekanisme pengawasan dapat dilakukan oleh komite audit. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh komite audit diharapkan dapat memperkuat fungsi pengendalian serta meminimalisasi potensi hadirnya perilaku oportunitis manajer. Dengan demikian jumlah anggota komite audit memiliki kaitan yang erat dengan seberapa banyak sumber daya yang dialokasikan untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi perusahaan.

Ukuran komite audit diharapkan dapat meningkatkan mekanisme *check and balance* (pengawasan dan keselarasan) dalam sebuah perusahaan sehingga dapat meminimalisir terjadinya praktik manipulasi laporan keuangan. Semakin besar ukuran komite audit maka kualitas laporan keuangan semakin terjamin. Sehingga besarnya ukuran komite audit diduga dapat mengurangi terjadinya kecurangan laporan keuangan. Penelitian terdahulu yang telah membuktikan peran komite audit berdampak pada kecurangan laporan keuangan yakni dilakukan oleh (Dwiyanti & Astriena, 2018; Sahami & Praptitorini, 2015). Dari argumen diatas, hipotesis yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut:

H1 : Ukuran komite audit berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

### **2.3.2 Pengaruh Komite Audit Independen terhadap Kecurangan Laporan Keuangan**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit mengatur agar anggota komite audit berasal dari pihak yang independen. Artinya, anggota komite audit diprioritaskan merupakan pihak yang tidak terikat dengan tanggung jawab atas pengelolaan entitas pada bidang eksekutif sebagaimana layaknya direksi, sehingga sangat independen dalam bekerja sebagai pengawas dan membantu untuk mengurangi perilaku oportunistik manajer.

Komite audit independen dapat melakukan langkah pencegahan ketika terdapat alternatif yang dinilai mengarah pada kecurangan laporan keuangan. Komite audit dapat memainkan perannya sebagai *supervisory board*. Beberapa penelitian empiris membuktikan bahwa komite audit independen dapat meminimalisasi kecenderungan kecurangan laporan keuangan (Kamarudin & Ismail, 2014; Kartika & Sudarno, 2014). Uraian di atas dapat menjadi dasar pengembangan hipotesis berikut:

H2 : Komite audit independen berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan

### **2.3.3 Pengaruh *Financial Expertise* terhadap Kecurangan Laporan Keuangan**

Jensen & Meckling (1976) mengungkapkan bahwa dalam teori keagenan terdapat agen dan prinsipal yang memiliki kepentingan yang berbeda, maka dari itu perlu adanya pengawasan terhadap setiap tindakan manajemen perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Pengawasan

tersebut dilakukan oleh dewan komisaris yang bertindak mewakili para pemegang saham perusahaan.

Dalam melakukan pengawasan, dewan komisaris dapat membentuk komite audit yang memiliki tugas untuk membantu pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Pengawasan tersebut juga termasuk pengawasan terhadap pelaporan keuangan. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan pelaporan keuangan, dewan komisaris memberi wewenang kepada komite audit untuk melakukan pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan. Komite audit dianggap mampu menjalankan kinerja pengawasan secara efektif apabila mempunyai anggota yang memiliki latar belakang keahlian dan kemampuan dalam bidang keuangan.

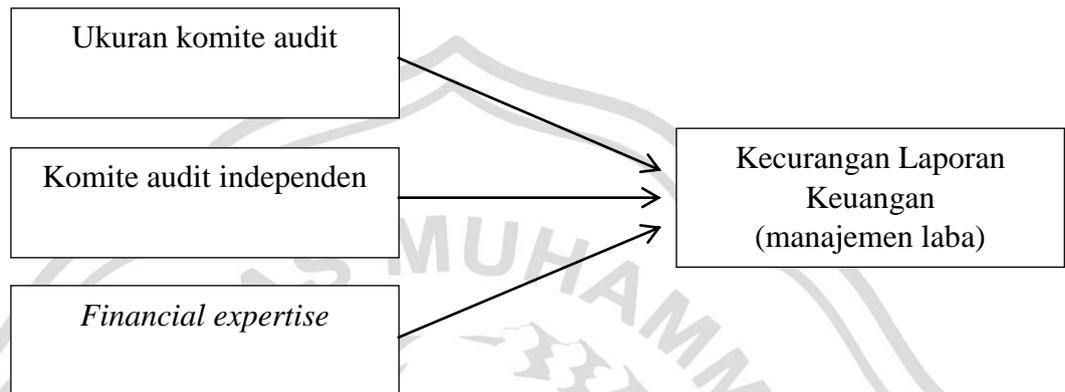
Penelitian (Handoko & Ramadhani, 2017; Prasetyo, 2014) menemukan bukti bahwa perusahaan yang memiliki minimal satu orang anggota berkeahlian keuangan dalam komite auditnya maka memiliki lebih sedikit kemungkinan berkaitan dengan kecurangan laporan keuangan. Adanya anggota komite audit yang memiliki keahlian keuangan komite audit dianggap dapat membantu perusahaan mengatasi tindak kecurangan pelaporan keuangan. Uraian di atas dapat menjadi dasar pengembangan hipotesis berikut:

H3 : *Financial expertise* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

## 2.4 Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah suatu hubungan atau kaitan yang mencerminkan hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya dari penelitian yang sedang diteliti.

Kerangka pikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pikir**

Berdasarkan pada kerangka pikir di atas, maka dapat diketahui bahwa penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi pada kecurangan laporan keuangan. Variabel yang diduga bisa menjadi faktor pada variabel kecurangan laporan keuangan adalah ukuran komite audit, komite audit independen, dan *financial expertise*. Pengujian dirumuskan dalam bentuk hipotesis. Hipotesis tersebut didasarkan pada konsep dari setiap variabel. Kemudian, secara harfiah peneliti mengaitkan variabel bebas yang diduga dapat mendeteksi variabel terikat dengan mengacu pada teori yang relevan.

Untuk dapat menganalisis model diatas, maka alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda.